

Post-Covid-19 City Recovery Based on Stakeholder Collaboration in Jakarta

Dhita Ayu Pradnyapasa¹, Nugraheni Setiastuti¹, Ugay Sugarmansyah^{1,2}, Heri Apriyanto¹, Taufiq Dwi Tamtomo¹

¹Research Center for Sustainable Production System and Life Cycle Assessment, National Research and Innovation Agency (BRIN), ²Department of Urban and Regional Planning, ITI
dhit002@brin.go.id

Article History

accepted 02/10/2022

approved 21/10/2022

published 25/11/2022

Abstract

Covid-19 has become a pandemi that has attacked 183 countries in the world. In December 2019, the Covid-19 Virus began to spread after it was discovered that a positive Covid-19 patient was in Wuhan, China. The Covid-19 virus also spread to Indonesia. The impact caused by the Covid-19 pandemic has not only affected the health sector, but also the economic and social fields. In April 2022, WHO decided to make Covid-19 endemi. This study analyzes the post-Covid-19 city recovery based on stakeholder collaboration in Jakarta. The method used is descriptive qualitative. A collaborative approach will make it easier to handle Covid-19. In handling the Covid-19 pandemic, the involvement of all actors (stakeholders) is required, so that not only the central and regional governments are responsible. Private/business involvement, academia, and the community are also needed. Involvement of stakeholder needs to be carried out in a measurable and integrated cooperation mechanism. A stakeholder collaboration approach needs to be applied to three strategic issues for handling this pandemi: policy, infrastructure, and budget. There are 3 (three) recommendations that the DKI Jakarta provincial government needs to make to implement city recovery after the Covid-19 pandemi based on stakeholder collaboration.

Keywords: Covid-19, pandemi, endemi, stakeholder collaboration

Abstrak

Covid-19 atau Sars-Cov-2 menjadi pandemi yang telah menyerang 183 negara di dunia. Sejak Desember 2019, Virus Covid-19 mulai menyebar setelah diketahui pasien positif Covid-19 di Wuhan, Cina. Virus Covid-19 juga menyebar hingga Indonesia. Dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang ekonomi dan sosial. Pada tahun April 2022, WHO memutuskan untuk menjadikan Covid-19 menjadi endemi. Penelitian ini menganalisis pemulihan kota pasca Covid-19 berbasis kolaborasi *stakeholder*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kolaborasi akan mempermudah penanganan Covid-19. Dalam penanganan pandemi Covid-19 diperlukan keterlibatan semua aktor (*stakeholder*), sehingga, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja yang bertanggungjawab. Keterlibatan swasta/bisnis, akademisi dan komunitas juga diperlukan. Keterlibatan *stakeholder* perlu dilakukan dalam suatu mekanisme kerja sama yang terukur dan terintegrasi. Pendekatan kolaborasi *stakeholder* perlu diterapkan dalam 3 (tiga) isu strategis penanganan pandemi ini yaitu kebijakan, infrastruktur, dan anggaran. Terdapat tiga rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengimplementasikan pemulihan kota setelah pandemi Covid-19 berbasis kolaborasi *stakeholder*.

Kata kunci: Covid-19, pandemi, endemi, kolaborasi pemangku kebijakan

Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series

p-ISSN 2620-9284

<https://jurnal.uns.ac.id/shes>

e-ISSN 2620-9292



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

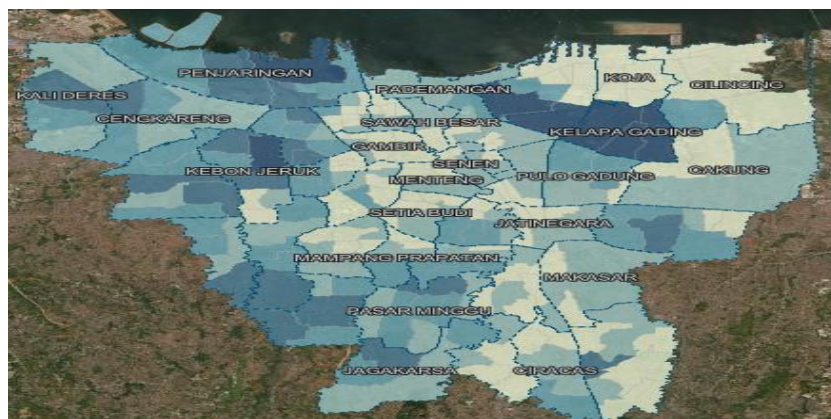
Pada Desember 2019, Pemerintah Kota Wuhan di Cina, mengidentifikasi virus corona (Covid-19) yang kemudian menjadi pandemi di seluruh dunia. Tercatat pada data WHO, terdapat 183 negara yang terjangkit penyakit Covid-19. Data yang dihimpun oleh Universitas John Hopkins per tanggal 27 Oktober 2022 menyebutkan bahwa terdapat 628.837.817 juta orang yang telah terjangkit penyakit Covid-19.

Pada tanggal 2 Maret 2020, 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga sejak saat itu, Indonesia mulai terjangkit pandemi virus Covid-19 dengan jumlah kasus yang semakin meningkat. Sikap awal pemerintah saat itu kurang serius menanggapi virus Covid-19, meski ada himbauan untuk *stay at home*, akan tetapi masyarakat masih ada yang harus keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara pemerintah tidak mampu memberikan subsidi atau kompensasi untuk perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19. Mobilisasi masyarakat ini sulit dikendalikan meski telah diterapkan sanksi oleh pemerintah. Alhasil, kasus yang positif Covid-19 semakin meningkat secara dratis setiap harinya. Pada akhirnya pemerintah seolah berada di dua sisi yang berbeda, yaitu antara kepentingan kesehatan atau ekonomi dalam penanganan pandemi ini dikarenakan dampak pandemi ini menyebabkan sektor perekonomian mengalami penurunan dratis.

Dengan ditetapkannya Covid-19 menjadi pandemi, Pemerintah Indonesia fokus pada bidang kesehatan masyarakat, khususnya pada penyakit Covid-19 sejak 31 Maret 2020. Sejak saat itulah pemerintah menetapkan penanganan Covid-19 melalui Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan secara berkala pada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kemudian pada tanggal 13 April 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.

Pandemi Covid-19 ini berdampak pada sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Tingkat pengangguran meningkat sejalan dengan adanya pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh banyak pekerja. Tingkat pengangguran yang meningkat ini berpengaruh pada anggaran negara menjadi defisit (Indayani, 2020). Tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2020 hingga 2021 meningkat menjadi 6,26%, yang didominasi oleh laki-laki (Surindra, 2021)).

Sejak Covid-19 menjadi pandemi, kasus positif di Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat. Kasus Covid-19 sampai tanggal 26 Oktober 2022 tercatat sebanyak 1.442.767 kasus. Sebaran kasus Covid-19 terlihat di gambar 1.



Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/peta-persebaran> (2022)

Gambar 1. Peta Sebaran Covid19 Provinsi DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta dalam menghadapi penularan virus ini telah menetapkan beberapa peraturan gubernur. Hal-hal yang diatur diantaranya adalah menetapkan status darurat pada saat itu, dengan berbagai kebijakan antara lain: menjaga jarak/*social distancing*, *rapid test*, penutupan fasilitas umum (taman kota dan hutan kota), dan pembatasan kegiatan di luar ruangan lainnya melalui *school from home* dan *work from home*.

Pandemi Covid-19 berdampak efek domino di berbagai sektor, termasuk pengurangan pekerja atau pemutusan kerja karyawan. Menurut Bank Dunia (2020), jumlah orang miskin baru secara global dikarenakan Covid-19 berkisar 124 juta. Dan akan bertambah hingga kisaran 180 juta pada tahun 2022.

Setelah dua tahun hidup dengan Covid-19, pada Mei 2022 Pemerintah Indonesia mengubah Covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Hal ini tentu saja mengubah kota yang terbiasa lengang menjadi hiruk pikuk dan menimbulkan kemacetan dimana-mana. Selain itu juga, berubahnya status pandemi menjadi endemi bukanlah berarti Covid-19 sudah hilang tetapi tetap ada.

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah titik balik dalam pembangunan perkotaan sehingga dalam pemulihan pasca Covid-19 dapat memanfaatkan berbagai *stakeholder*. *Stakeholder* dapat mulai berkolaborasi untuk menata kembali kota pasca Covid-19. Interaksi antara organisasi atau pemerintah, aliansi strategis dan *networks* multi organisasi diperlukan untuk menciptakan kolaborasi. Dengan adanya kerjasama antara 2 (dua) atau lebih *stakeholder* dalam pengelola sumber daya yang sama, akan mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama yang jelas dan kepercayaan serta komitmen maka kolaborasi akan terjalin dengan baik (Adisasmita, 2010).

Cahyono (2021) mengungkapkan bahwa dalam penanganan Covid-19 diperlukan adanya implementasi *collaborative governance* dalam bentuk kerjasama lintas disiplin dan bidang. Dengan mengefektifkan *collaborative governance* maka secara faktual masyarakat akan memperoleh informasi dan publik akan lebih mudah untuk memahami informasi yang diperolehnya.

Salah satu contoh penanganan Covid-19 yang menerapkan kolaborasi *stakeholder* melalui partisipasi masyarakat dan pemerintah, yaitu program di Jawa Timur yang dikenal dengan Kampung Tangguh Semeru. Desa dan masyarakat merupakan entitas sosial paling kecil dalam pertahanan terakhir memitigasi bencana. Sehingga dengan terciptanya ketangguhan desa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan (Rahmawati, dkk, 2021).

Rivelino dan Arwanto (2020) telah menganalisis bahwa dalam penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta memerlukan sudut pandang *good governance*. Dengan *good governance* maka sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat akan tercipta.

Dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* penanganan Covid-19 melalui implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan. Kendala yang masih dihadapi saat ini, yaitu masih adanya komunikasi yang kurang efektif antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sikap pelaksana dari pemerintah pusat yang kurang responsif, masih minimnya pengawasan bantuan sosial (bansos) serta masih adanya pelanggaran aturan pelaksanaan PSBB (Khasanah, R. P., & Purwaningsih, T., 2021).

Dalam menanggapi masalah pengangguran pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia melaksanakan beberapa kebijakan, antara lain: (1) pengalokasian dana untuk mendorong peningkatan perekonomian para pelaku usaha; (2) penyediaan program-program penguatan ekonomi, misalnya dengan pemberian insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran kredit dan relaksasi iuran

jaminan sosial ketenagakerjaan; (3) penyediaan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal; (4) pemberian insentif pelatihan melalui Program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK, (5) memperbanyak program perluasan kesempatan kerja (Rizal dan Mukaromah, 2021)

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran stakeholder Pemerintah DKI Jakarta dalam menghadapi *new normal* setelah pandemi covid-19? Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran peran stakeholder Pemerintah DKI Jakarta dalam menghadapi *new normal* setelah pandemi covid-19.

METODE

Permasalahan dalam kehidupan sosial secara holistik, kompleks dan rinci dapat diteliti melalui penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dapat menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya (Murdiyanto, 2020). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan analisis deskriptif.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan data sekunder, seperti studi literatur, dokumentasi dan observasi. Menurut Sugiyono (2016), data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini, yaitu dengan merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik, lalu data disajikan dan ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani dengan menggunakan pendekatan kolaborasi *stakeholder*. Kolaborasi adalah bekerja bersama dengan orang lain, baik individu maupun kelompok/organisasi dengan syarat dan kondisi tertentu (O'Flynn, J., & Wanna, J., 2008). Sedangkan *stakeholder* adalah individu atau kelompok masyarakat yang saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan dari organisasi (Freeman, 1994). Teori *stakeholder* banyak dikembangkan kedalam bidang-bidang pengetahuan yang beragam, sehingga secara umum *stakeholder* dapat didefinisikan sebagai kelompok maupun perorangan yang dapat memberikan pengaruh maupun dipengaruhi serta terlibat oleh keputusan, Tindakan dan menjadi bagian dari fenomena kejadian tersebut, dan dapat berasal dari aktor internal maupun eksternal, perorangan maupun organisasi, insitusi maupun kelompok masyarakat tertentu (Erkul et al., 2016; Lo et al., 2013; Muchangos et al., 2017)

Kolaborasi *stakeholder* dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan mempercepat implementasi di lapangan karena adanya pembagian sumber daya dan pembagian tanggung jawab. Keahlian dan kapasitas masing-masing aktor menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Hal lainnya yang penting untuk diperhatikan adalah kerja sama atau kolaborasi setiap elemen yang berkepentingan di tengah pandemi.

Respon atas keadaan darurat di DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan banyaknya elemen yang terlibat untuk menangani pandemi Covid-19. Tidak hanya pemerintah, berbagai gerakan karitatif di masyarakat turut berperan untuk mengatasi dampak pandemi ini. Namun, respon atau aktivitas masing-masing elemen tidak dalam suatu skema kolaborasi yang terukur dan integrasi. Masing-masing elemen berjalan pada alur yang ditetapkannya sendiri dan dilakukan secara sporadis. Isu kolaborasi *stakeholder* dengan diprakarsai oleh pemerintah provinsi penting dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 secara terukur dan terintegrasi.

Pandemi Covid-19 merupakan suatu momentum dan titik balik bagi pemikir kebijakan perkotaan untuk mulai menata kembali apa saja yang telah diabaikan selama ini oleh pemerintah. Dimulainya kehidupan *new normal* pasca pandemi Covid-19 mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah untuk menghadapi dan melanjutkan kembali *new normal*. Diperlukan pendekatan yang fleksibel dalam masa-masa pemulihan kota pasca Covid-19 dikarenakan segala sesuatu serba tidak pasti yang dapat menyebabkan resesi ekonomi dan perubahan iklim global. Harus ada kolaborasi *stakeholder* untuk memberikan intervensi kebijakan terhadap masyarakat yang rentan terhadap guncangan sehingga dapat *survive* di kemudian hari. Diperlukan juga adanya lokakarya *transformative* hasil dari kolaborasi masyarakat, peneliti, akademisi, dan pemangku kebijakan guna mendorong tata kelola inklusif dan *green recovery*.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta (2022) mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta, dapat diketahui bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, TPT mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat disebabkan karena berkurangnya lapangan kerja yang ada di Jakarta. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu dengan adanya perbaikan kondisi selama pandemi, TPT pada tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan persentase, yang semula sebesar 10,95% pada tahun 2020, persentase menurun menjadi sebesar 8,50% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Jakarta. Data TPT DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/Kotamadya	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2019	2020	2021
DKI Jakarta	6,22	10,95	8,50
Kepulauan Seribu	5,44	7,37	8,58
Jakarta Selatan	6,84	10,79	7,33
Jakarta Timur	6,15	9,29	8,23
Jakarta Pusat	7,51	10,97	7,75
Jakarta Barat	5,21	12,27	9,06
Jakarta Utara	6,32	11,79	9,84

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2022, BPS

Salah satu peran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi ini yaitu dengan menyediakan program latihan kerja di Kotamadya Jakarta Selatan. Saat ini masih perlu dikembangkan lebih baik lagi pada pelatihan bidang teknologi informatika yang bersertifikat nasional BNSP. Untuk menciptakan kolaborasi *stakeholder*, pemerintah daerah perlu mengadakan kerjasama dengan mitra lokal/asing yang *reputable*, serta mitra bisnis, agar penyerapan tenaga kerja dapat lebih cepat dan mudah (Devi, Madhakomala & Sutanto, 2022).

Jika ditinjau dari jumlah pekerja di DKI Jakarta, pada tahun 2020 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 4.659.251 orang, dimana jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 4.836.977 orang. Kemudian di tahun 2021 penduduk yang bekerja meningkat menjadi 4.737.415 orang. Diharapkan dengan meningkatnya jumlah pekerja di DKI Jakarta maka sektor ekonomi akan berangsur memulih. Data jumlah pekerja dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta

Pekerja Formal	Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Pekerja Formal	3.310.936	2.878.424	2.924.706
Pekerja Informal	1.526.041	1.780.827	1.812.709
Penduduk yang Bekerja	4.836.977	4.659.251	4.737.415

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2022, BPS

Jumlah pekerja formal mengalami penurunan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2020 merupakan masa pandemi Covid-19. Dampak dari pandemi mengakibatkan menurunnya pendapatan perusahaan, sehingga mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja (PHK).

Di sisi lain, pekerja informal terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Peran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat diperlukan untuk mendukung kegiatan pekerja informal untuk dapat berkembang menjadi pekerja formal. Salah satu upaya untuk mendukung pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Contohnya PKT di Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada pelaksanaan PKT yang telah berjalan, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu penambahan jumlah petugas pendamping program, peningkatan daya tarik program, pendistribusian modal yang tepat sasaran dan inovasi pengelolaan lingkungan/limbah yang lebih efektif. (Adyuhnaf, 2022).

Dalam mengatasi pengangguran pada masa pandemi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa program penguatan ekonomi melalui insentif pajak penghasilan. Hal tersebut juga telah dilakukan oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui penerapan Kebijakan PPh 21. Pemerintah DKI Jakarta telah membebaskan pungutan pajak sebesar 100% pajak atas penghasilan. Penerapan program ini diharapkan dapat menjaga kestabilan ekonomi bagi masyarakat (Safitri dkk, 2021).

Hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk pemulihan kota setelah covid-19 adalah : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memulai kerja sama dengan stakeholders yang bersifat mengikat di bidang *fundraising* dalam pendanaan *promoting and preventing actions* penanganan pandemi Covid-19 apabila ada kasus baru. Yang kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama untuk menggerakkan UKM-UKM agar perekonomian masyarakat berjalan kembali dan yang ketiga, kebijakan relokasi anggaran dalam APBD memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat sebagai hal yang utama. Meski dalam keadaan *new normal*, masyarakat tetap menjaga kesehatannya dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta tetap menggunakan masker dalam kesehariannya agar menghindari penambahan kasus positif covid-19.

SIMPULAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kolaborasi *stakeholder* dalam pemulihan kota pasca Covid-19. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan *flexible* kepada masyarakat, agar tetap melakukan gaya hidup sehat dan bersih , tidak

mengabaikan penggunaan masker di tempat umum sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 kembali. Selain itu juga harus ada intervensi kebijakan oleh *stakeholder* yang diputuskan oleh pemangku kepentingan dan yang terakhir adalah adanya transformasi yang melibatkan berbagai pihak *stakeholder* guna mendorong tata kelola inklusif dan *green recovery*. Pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dengan mitra local/asing telah menyediakan program latihan kerja dalam mengatasi TPT. Pemerintah DKI Jakarta dapat melakukan tiga kebijakan untuk pemulihan kota pasca covid-19, yaitu: pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memulai kerja sama dengan stakeholders yang bersifat mengikat di bidang *fundraising* dalam pendanaan *promoting and preventing actions* penanganan pandemi Covid-19 apabila ada kasus baru. Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama untuk menggerakkan UKM-UKM agar perekonomian masyarakat berjalan kembali, dan yang ketiga, kebijakan relokasi anggaran dalam APBD memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat dan ekonomi sebagai hal yang utama. Meski dalam keadaan *new normal*, masyarakat tetap harus menjaga kesehatannya dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta tetap menggunakan masker dalam kesehariannya agar menghindari lonjakan kasus covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aduahnaf, A. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota (Persen)*. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus, BPS. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/154/84/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-provinsi-dki-jakarta-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)*. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus, BPS. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/6/1090/1/jumlah-pekerja-formal-dan-informal-di-provinsi-dki-jakarta.html>.
- Cahyono, A. S. (2020). *Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19*. *Publiciana*, 13(1), 83-88.
- Devi, N. K., Madhakomala, R. M. R., & Sutanto, S. (2022). Strategi Program PPKD Jakarta Selatan Melalui Program Latihan Kerja dalam Mengatasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Masa Pandemi Covid-19. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955*, 3(5), 375-381.
- Erkul, M., Yitmen, I., & Çelik, T. (2016). *Stakeholder Engagement in Mega Transport Infrastructure Projects*. Paper presented at the World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 201.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Marshfield: Pitman Publishing Inc.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. *Jurnal Perspektif*, 18(2), 201-208.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

- Khasanah, R. P., & Purwaningsih, T. (2021). Analisis *Collaborative Governance* dalam Implementasi Kebijakan Psbb Pada Penanganan Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 2(3), 155-169.
- Lo, C. C., Wang, C. H., & Huang, C. C. (2013). The national innovation system in the Taiwanese photovoltaic industry: A multiple stakeholder perspective. *Technological Forecasting & Social Change*, 80 893–906.
- Muchangos, L. S. d., Tokai, A., & Hanashima, A. (2017). Stakeholder analysis and social network analysis to evaluate the stakeholders of a MSWM system – A pilot study of Maputo City. *Environmental Development*, 24.
- Murdiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). 2020. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Yogyakarta Press.
- O’Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* (p. 201). ANU Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Rahmawati, Yusrin. Anugrah, F.F. Hati, E. M. dan Riziqin, Ali. (2021). Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar-Stakeholder dalam Merespons Pandemi COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 2 (1), 39-51.
- Rivelino dan Arwanto, H. G. (2020). Tata Kelola Kolaborative dalam Kebijakan Publik dari Perspektif Penanganan Covid-19 DKI Jakarta. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13 (1).
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021, February). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN AKIBAT PANDEMI COVID-19. In *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies* (Vol. 1, pp. 1-12).
- Safitri, H. R., Yanty, N. A., Adelia, S., Kusumaningtyas, T., & Sofyan, M. (2021). Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(4), 138-144.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : IKAPI.
- Surindra, B., Artantri, M. W., Forijati, R., & Anas, M. (2021). Analisis Pengangguran Dan Kesempatan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Dan Kewirausahaan (JPEAKU)*, 1(2), 68-74.